



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Gaji Rp 504 Juta “raib”, KPU Minta Audit BPK

SELUMA – Masih soal raibnya dana Rp 504 juta gaji 448 PPS dan PPK tiga kecamatan, khususnya bulan November dan Desember yang diduga diselewengkan mantan bendahara. Untuk mengungkap bagaimana uang dalam jumlah besar itu bisa diselewengkan, dan mencari kemungkinan adanya penyelewengan anggaran lainnya, KPU Seluma berinisiatif meminta BPK Bengkulu melakukan audit. Khususnya keuangan KPU Seluma tahun anggaran 2018.

Sebagaimana disampikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seluma, Sarjan Efendi, SE kepada RB, kemarin (4/3). “Untuk mekanisme audit ini kita serahkan ke KPU Provinsi. Yang jelas saya minta anggaran tahun 2018 ini diaudit agar semua jelas. Apakah ada penyimpangan atau tidak,” tegas Sarjan.

Dijelaskan Sarjan, dalam audit ini ia berharap dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Meminta KPU Provinsi Bengkulu menyurati BPK. “Besok (hari ini, red) audit dimungkinkan mulai dilakukan oleh BPK. Kami hanya menunggu, kapan mau mulai kami siap,” sampai Sarjan.

Adanya audit ini, diharapkan KPU Seluma bebas dari segala bentuk

penyimpangan atau penyelewengan anggaran. Selain itu Sarjan juga ingin mengetahui pasti besaran dugaan dana yang telah diselewengkan yang dilakukan oleh bagian keuangan KPU Seluma selama tahun 2018.

“Ini kita lakukan agar ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. KPU Seluma harus bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi,” tukasnya.

Terkait gaji bulan November dan Desember 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang saat ini belum terbayarkan, Sarjan mengatakan masih berusaha mencari solusi. Yang pasti untuk proses hukum pihaknya sudah menyerahkan ke Polres Seluma, mengusut tuntas pelaku penyelewengan itu.

“Kita juga telah sampaikan hal ini ke KPU Provinsi. Kita tunggu saja, yang jelas gaji yang tertunda tersebut pasti akan dibayarkan. Kami berharap PPK dan PPS khususnya di tiga kecamatan yang belum menerima gaji bulan November dan Desember untuk bersabar, pasti dibayarkan. Untuk itu tetaplah bekerja seperti biasa melaksanakan semua tahapan pemilu yang telah direncanakan, mengingat waktu pelaksanaan pencoblosan sudah semakin dekat,” demikian Sarjan. (aba)